

**LITERASI DIGITAL DAN INTENSI UNTUK
MENGADOPSI E-GOVERNMENT
(SURVEI PADA PEGAWAI INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Diajukan oleh:

**FIRANDA MEITANIA
NIM 07011281924251**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**LITERASI DIGITAL DAN INTENSI UNTUK
MENGADOPSI *E-GOVERNMENT***

**(SURVEI PADA PEGAWAI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

FIRANDA MEITANIA

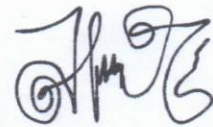
.NIM. 07011281924251

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2023

Pembimbing,

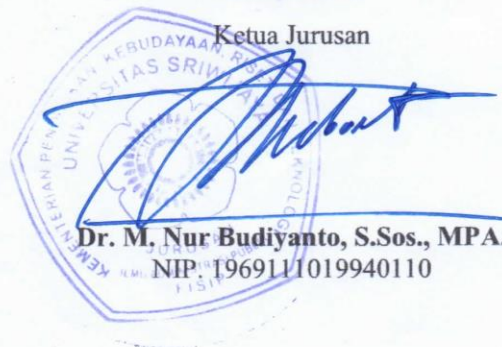
Anang Dwi Santoso, S.AP.,MPA

NIP. 199310072019031012



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 1969111019940110

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
LITERASI DIGITAL DAN INTENSI UNTUK
MENGADOPSI E-GOVERNMENT**
(Survei Pada Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

SKRIPSI OLEH:

**Firanda Meitania
07011281924251**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 23 Mei 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

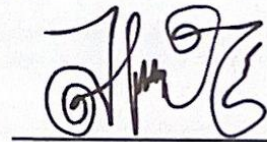
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111019994011001



Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP
NIP. 198701052015041003



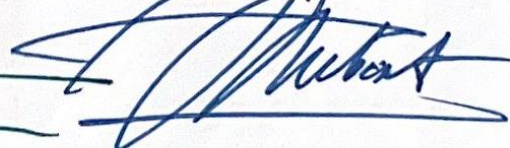
Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP. 199310072019031012



Mengetahui,



Ketua Jurusan
Administrasi publik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111019994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firanda Meitania

NIM : 07011281924251

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Literasi Digital dan Intensi untuk Mengadopsi E-Government (Survei Pada Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)” ini benar-benar hasil karya Saya sendiri dan Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengintipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau terdapat pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, Saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada Saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun

Yang membuat pernyataan,

Indralaya, 15 Mei 2023



Firanda Meitania

NIM.07011281924251

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“It’s okay to fall down, to get hurt.

All you have to do is get back up and keep running.”

-Kim Namjoon of BTS-

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

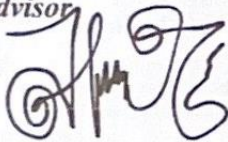
1. Kedua orang tua saya, bapak Achmad Fikri dan ibu Siti sayira
2. Adik kandung saya Muhammad Rendi Al rapli
3. Sahabat dan teman seperjuangan
4. Seluruh dosen prodi Ilmu Administrasi Publik
5. Pegawai dan staf FISIP Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze and determine digital literacy and the intention to adopt-government to the employees of the Regional Inspectorate of South Sumatra Province. This research used variables perceived usefulness and perceived ease of use as an intervening variable that influence a person's intention to adopt or not nor directly or indirectly. This research used quantitative research method using applications SmartPLS version 3. This Data was collected by distribute questionnaire to 80 employees of the Regional Inspectorate of South Sumatra Province using the simple random sampling and likert scale measurement. The results of this research stated that digital literacy did not significantly affected the intention to adopt-government, digital literacy affected the perceived usefulness, and the perceived usefulness influenced on the intention to adopt e-government, Digital literacy affected the intention to adopt e-government through perceived usefulness, Digital literacy influenced the perceived ease of use, The perceived ease of use influenced the intention to adopt e-government, Digital literacy affected the intention to adopt e-government through perceived ease of use.

Keywords: Digital Literacy, Intention to Adopt, Technologi Acceptance Model

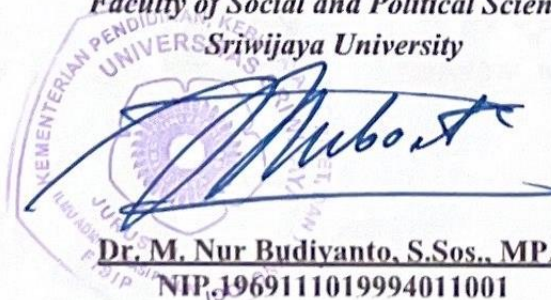
Advisor



Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP.199310072019031012

Indralaya, May 2023

Chairman of the Public Administration Departement
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP.1969111019994011001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui literasi digital dan intensi untuk mengadopsi *e-government* pada pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan variabel *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* sebagai variabel intervening yang mempengaruhi niat seseorang untuk mengadopsi atau tidak baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan aplikasi *SmartPLS* versi 3. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 80 pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan pendekatan *simple random sampling* dan menggunakan pengukuran skala *likert*. Adapun hasil penelitian dinyatakan bahwa literasi digital tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap intensi mengadopsi *e-government*, literasi digital mempengaruhi *perceived usefulness*, *perceived usefulness* berpengaruh terhadap intensi mengadopsi *e-government*, Literasi digital mempengaruhi intensi mengadopsi *e-government* melalui *perceived usefulness*, Literasi digital mempengaruhi *perceived ease of use*, *perceived ease of use* mempengaruhi intensi mengadopsi *e-government*, Literasi digital mempengaruhi intensi mengadopsi *e-government* melalui *perceived ease of use*.

Kata Kunci: Literasi Digital, Intensi Mengadopsi, *Technology Acceptance Model*

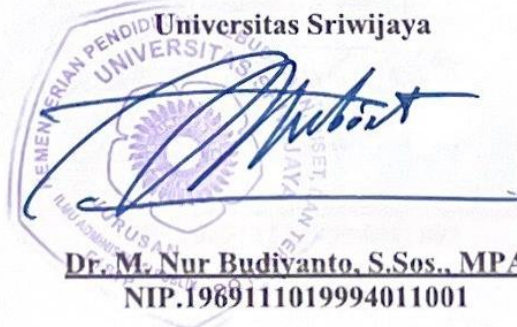
Pembimbing



Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP.199310072019031012

Indralaya, Mei 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.1969111019994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunia-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Literasi Digital Dan Intensi Untuk Mengadopsi *E-Government* (Survei Pada Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)” dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP UNSRI. Penelitian ini tentu saja tak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai sampai akhirnya peneliti dapat menyelesaikan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Peneliti berharap kedepannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu peneliti sangat berterima kasih kepada:

1. ALLAH SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga peneliti diberikan kelancaran
2. Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan petunjuk atas kehidupan yang terang benderang
3. Kedua orang tua peneliti, bapak Achmad Fikri dan ibu Siti Sayira yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian kepada peneliti sejak lahir sampai saat ini
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, IPU., ASEAN., Eng. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
7. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu mengarahkan selama melakukan studi sejak semester awal hingga akhir.
8. Bapak Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staff Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Ibu pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu selama dilakukannya penelitian ini.
11. Seluruh anggota keluarga yang memberikan semangat serta dukungan selama peneliti menempuh Pendidikan dibangku perkuliahan.

12. Sahabat dan teman-teman yang telah memotivasi, memberikan semangat, mendengarkan keluh-kesah peneliti selama ini.
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan kepada peneliti dalam penelitian dan penyusunan skripsi

Tanpa dukungan dari semua pihak, peneliti tidak mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Peneliti telah memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, akan tetapi peneliti tidak dapat terlepas dari kesalahan. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran membangun guna dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Atas Kerjasama dan perhatiannya, peneliti ucapkan terima kasih.

Indralaya, 21 mei 2023



Firanda meitania

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG	xvii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan.....	16
1.4 Manfaat.....	16
1.4.1 Manfaat teroris.....	17
1.4.2 Manfaat praktis	17
BAB II.....	18
2.1 Landasan Teori	18
2.2 Theory of Planned Behavior (TPB).....	18
2.3 Technology Acceptance Model (TAM).....	20

2.4 Literasi Digital.....	22
2.4.1 Literasi	22
2.4.2 Konsep Literasi Digital	23
2.4.3 Indikator Literasi Digital.....	24
2.5 Penelitian Terdahulu.....	26
2.6 Kerangka Pemikiran	37
2.7 Hipotesis	38
BAB III.....	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Definisi Konsep	41
3.3 Definisi Operasional	42
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	44
3.5 Populasi Dan Sampel.....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6.1 Kuesioner atau Angket.....	46
3.6.2 Observasi.....	47
3.6.3 Studi Dokumentasi.....	47
3.7 Pilot Study	48
3.8 Teknik Analisis Data	50
3.8.1 Statistik Deskriptif	51
3.8.2 Uji Hipotesis PLS (Partial Least Square).....	51
3.9 Jadwal Penelitian	54
3.10 Sistematika Penulisan	54
BAB IV	56
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56

4.2 Demografi Responden	58
4.2.1 Jenis Kelamin Responden	58
4.2.2 Usia Responden	58
4.2.3 Status kepegawaian	59
4.2.4 Pendidikan Responden.....	60
4.2.5 Karakteristik Tanggapan Responden	60
4.3 Hasil Penelitian.....	68
4.3.1 Outer Model	69
4.3.2 Inner Model.....	73
4.3.3 Uji Hipotesis	76
4.4 Pembahasan	82
BAB V	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran	88
5.3 Keterbatasan Penelitian	89
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah penduduk indonesia yang terkoneksi internet 2021-2022	3
Gambar 2 Indeks Literasi Digital Sumatera Selatan	7
Gambar 3 Theory Of Planned Behavior.....	19
Gambar 4 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 5 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan....	57
Gambar 6 First Order	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indeks Literasi Digital Nasional Indonesia.....	6
Tabel 2 Rentang Usia Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan...	11
Tabel 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Alokasi dan Jenjang Pendidikan	12
Tabel 4 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 5 Definisi Operasional	42
Tabel 6 Skala Likert	47
Tabel 7 Pilot Study Validitas	48
Tabel 8 Pilot Study Reliabilitas.....	50
Tabel 9 Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS.....	52
Tabel 10 Parameter Uji Reabilitas dalam Model PLS	53
Tabel 11 Jadwal Penelitian.....	54
Tabel 12 Klasifikasi Jenis Kelamin Responden.....	58
Tabel 13 Klasifikasi Usia Responden	59
Tabel 14 Klasifikasi Status Kepegawaian.....	59
Tabel 15 Klasifikasi Pendidikan Responden.....	60
Tabel 16 Tanggapan terhadap Literasi Digital.....	61
Tabel 17 Tanggapan terhadap Perceived Usefulness.....	64
Tabel 18 Tanggapan terhadap Perceived Ease Of Use	66

Tabel 19 Tanggapan terhadap Intensi Mengadopsi E-Government.....	67
Tabel 20 Loading Factor	70
Tabel 21 Average Variance Extracted (AVE)	71
Tabel 22 Cross Loading	71
Tabel 23 Cronbach Alpha dan Composite Reliability	73
Tabel 24 R-square	74
Tabel 25 Path Coefficient dan T-Value	74
Tabel 26 F-square.....	75
Tabel 27 Uji Hipotesis	76
Tabel 28 Uji Hipotesis Variabel Intervening	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	93
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	94
Lampiran 3 Kartu Bimbingan	95
Lampiran 4 Lembar Revisi Seminar Proposal	96
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Seminar Proposal	97
Lampiran 6 Pedoman Kuesioner	98
Lampiran 7 Hasil Kuesioner Penelitian	102
Lampiran 8 Indikator Data Smartpls.....	103
Lampiran 9 Model SmartPLS Versi 3.....	104
Lampiran 10 Surat Keputusan Skripsi	105
Lampiran 11 Matrix Revisi	107

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

SMA	: Sekolah Menengah Atas
D3	: Diploma 3
S1, S2, S3	: Strata 1, Strata 2, dan Strata 3
IT	: Teknologi Informasi
TAM	: <i>Technologi Acceptance Model</i>
PU	: <i>Perceived Usefulness</i>
PEOU	: <i>Perceived Ease of Use</i>
BU	: <i>Behavioral Using</i>
PLS	: <i>Partial Least Square</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mengalami peningkatan disetiap tahunnya penggunaan teknologi informasi memudahkan semua orang untuk mengakses sesuatu melalui alat elektroniknya. Seiring dengan berjalannya perkembangan, teknologi informasi ini memudahkan kehidupan manusia seperti melakukan pembayaran, transportasi, Pendidikan, bahkan pada pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah Indonesia dewasa ini turut melakukan inovasi yang selaras dengan perkembangan zaman terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rukayat (dalam Aswin & Mediyastuti Sofyan, 2022:65) berpendapat bahwa pemerintah sebagai penyedia pelayanan harus bertanggung jawab dan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik guna meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dewasa ini tengah gencarnya melakukan transformasi birokrasi dari pemerintahan yang bersifat tradisional menjadi pemerintahan yang berbasis elektronik dengan mengadopsi teknologi informasi.

Teknologi informasi digunakan untuk mempermudah pemerintah dalam meningkatkan kinerja sehingga menjadi lebih efisien, akuntabel, dan berkualitas. Transformasi ini merubah cara kerja pelayanan publik yang diberikan dengan memanfaatkan sistem *Electronic Government (E-Government)*. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi dalam mengakses dan memberikan pelayanan kepada warga negara, mitra kerja, dan pegawai pemerintahan (Silcock, 2001:88). Menurut (Utomo & Mulyanto, 2010:16) *E-Government* ialah sistem pemerintah yang memanfaatkan

ICT (*Information, communication and technology*) yang digunakan sebagai alat dalam memberikan kemudahan proses komunikasi dan pelayanan kepada warga negara, mitra bisnis, dan lembaga pemerintah sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Forman dalam (Utomo & Mulyanto, 2010:35) *E-Government* diartikan sebuah penggunaan teknologi digital dalam menjalankan kegiatan pemerintah dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pelayanan (*public service*).

Sejak disahkan dalam Instruksi Presiden (INPRES) No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, proses pemerintahan di Indonesia berubah menjadi berbasis elektronik. Transformasi tersebut didasarkan pada pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, keinginan menjalankan mewujudkan *Good Government*, dan perubahan sistem pemerintah yang menjadi pemerintahan demokratis transparan dengan menjunjung supermasi hukum. Dengan demikian, pemerintah berupaya melaksanakan pemerintahan yang transparan, efisien, efektif dan terakuntabilitas dengan memanfaatkan *E-Government*. Pengembangan sistem pemerintahan elektronik juga memiliki tujuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengusahakan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada dan pengoptimalan pengelolaan data, informasi, proses birokrasi, dan manajemen pelayanan. Adapun tujuan *E-Government* berdasarkan INPRES No.3 Tahun 2003¹ dapat dirincikan sebagai berikut:

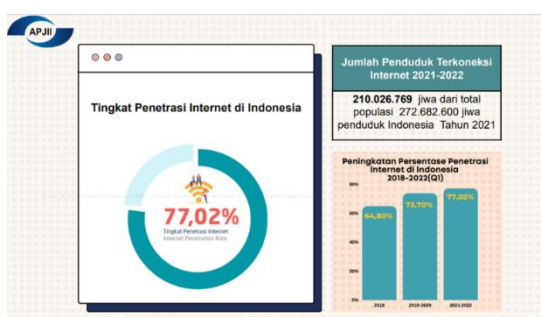
1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan cara memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu.

¹ Instruksi Presiden No.03 Tahun 2003

2. Meningkatkan perekonomian nasional dengan menjalankan hubungan interaktif antar mitra usaha dan mampu bersaing di perdagangan internasional.
3. Memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi dan komunikasi antar lembaga pemerintahan dan sebagai fasilitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan suatu kebijakan.
4. Membentuk manajemen pemerintahan yang transparan, efisiensi dan mempermudah komunikasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah.

Pencapaian tujuan yang dibuat oleh pemerintah tentu saja memerlukan modal yang cukup besar, mulai dari alur birokrasi yang biasanya tatap muka menjadi daring, infrastruktur, dan hal penunjang lainnya sehingga masyarakat dapat merasa puas akan pelayanan yang diterima. Selain hal tersebut, penyebaran internet di seluruh wilayah indonesia diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari sistem *E-Government* ini. APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2022 mencatatat sekitar 77,02% masyarakat indonesia menggunakan internet yang pada tahun 2020 sebanyak 73,70%.

Gambar 1 Jumlah penduduk indonesia yang terkoneksi internet 2021-2022



Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Penggunaan internet yang semakin meningkat mendefinisikan peningkatan teknologi informasi yang membuat pemerintah harus menghadapi tantangan era digitalisasi. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih mengoptimalkan pelayanan publik

melalui *e-government* agar dapat menjawab tantangan tersebut. Akibat adanya pandemi Covid-19 juga menjadi faktor perkembangan teknologi berbasis internet semakin tinggi lagi. Namun, dalam pelaksanaan terdapat kendala akibat perkembangan teknologi yang terlalu cepat yaitu kurangnya literasi digital pada pegawai pemerintah dalam menjalankan *e-government*.

Literasi merupakan sesuatu yang telah ada dari zaman kehidupan prasejarah sampai dengan sekarang. UNESCO (Law et al., 2018) mendefinisikan literasi ialah sebuah kemampuan manusia untuk memahami, mengidentifikasi, berkomunikasi, menafsirkan, menciptakan dan menggunakan media cetak dan tulisan yang berkaitan dengan suatu konteks. Literasi sendiri berasal dari Bahasa Inggris "*literacy*" yang berarti kemampuan baca dan tulis. Clifford dalam (Bawden, 2001:4) mengatakan bahwa literasi tidak hanya melek huruf atau buta huruf saja, akan tetapi terdapat perilaku belajar berfikir logis, keterampilan kognitif yang baik dan penalaran. Olsen dan Coons dalam (Bawden, 2001:4) turut mendefinisikan literasi yaitu "*Literacy can be defined as having the skills one needs to make the connection to the information necessary to survive in society*" yang berarti keterampilan yang dibutuhkan dalam membuat hubungan dengan informasi yang diperlukan dimasyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin kompleks, membuat manusia harus menguasai literasi digital. Istilah literasi digital telah digunakan sejak tahun 1990-an yang merujuk kepada kemampuan membaca dan memahami teks *hypertextual* dan multimedia (Bawden, 2001:21). Lanham dalam (Bawden, 2001:21) menyatakan bahwa literasi digital merupakan sinonim dari melek multimedia yang berarti memahami informasi yang tersaji, menguraikan gambar, suara, teks, angka yang disajikan bukan dengan media cetak. Sharma et. al. dalam

(Rumata & Nugraha, 2020:470) turut mendefinisikan literasi digital ialah kemampuan dalam pengaplikasian internet dan media digital yang bertujuan mengakses dan mengevaluasi informasi digital dan turut bergabung dalam kegiatan membuat konten, melakukan komunikasi, dan pertukaran informasi.

Konsep literasi digital pertama kali dipopulerkan oleh Paul Gilster pada tahun 1997 dengan bukunya yang berjudul *digital literacy*. Gilster menekankan bahwa literasi digital merupakan tentang menguasai ide, bukanlah penekanan tombol. Literasi digital serangkaian baru yang membuat manusia untuk mendekati komputer atau media digital dalam mengakses informasi, berinteraksi, berkomunikasi, serta mempublikasi. Semakin berkembangnya pengetahuan mengenai literasi digital, UNESCO membuat komponen literasi digital terdiri dari tiga komponen yaitu wawasan, keterampilan, dan perilaku. komponen tersebut diadopsi dari Organisasi Kerja Sama Dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam *OECD Future of Education and Skills 2030* (Law et al., 2018:123) . Sedangkan, kementerian komunikasi dan informatika membagi literasi digital menjadi empat variabel yaitu kemampuan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital (Ameliah et al., 2021:9). Berdasarkan ke-empat variabel tersebut, Kementrian Komunikasi dan Informatika menyatakan indeks literasi digital nasional Indonesia tahun 2022 sebesar 3,54 dengan rincian sebagai berikut (Ameliah et al., 2021:57):

Tabel 1 Indeks Literasi Digital Nasional Indonesia

No.	Pilar	Nilai
1.	Kemampuan Digital	3,52
2.	Budaya Digital	3,84
3.	Etika Digital	3,68
4.	Keamanan Digital	3,12

Sumber : Kementrian Komunikasi dan Informatika (Ameliah et al., 2021:57)

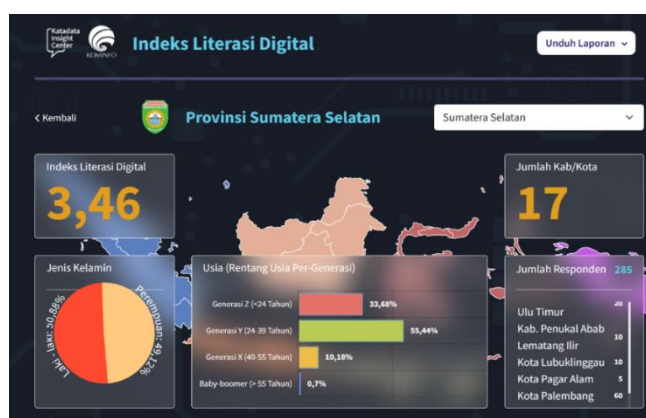
Pengetahuan digital atau literasi digital sangat penting untuk dipahami bagi pengguna teknologi informasi dan komunikasi khususnya penggunaan media digital. Literasi digital harus diperhatikan oleh pemerintah, dikarenakan kurangnya pemahaman dari penggunaan media digital dapat memunculkan masalah yang akan mengganggu perkembangan penggunaan *e-government*. Pelayanan publik berbasis internet akan sangat sulit dilakukan tanpa adanya pemahaman mengenai literasi digital. Pada bulan maret pada tahun 2019, pandemic Covid-19 memaksa masyarakat Indonesia untuk melakukan pekerjaan dirumah atau *Work From Home* (WFH), termasuk didalamnya pegawai pemerintah. WFH ini membuat seluruh pegawai untuk tidak datang secara fisik ke kantor dan melakukan tugas mereka dirumah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan WFH yang seharusnya dapat meningkatkan penggunaan *E-government* ternyata tidak berjalan mulus. PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana (Saputri & Febryan A, 2022:1) menyatakan sekitar 30 persen ASN mengatakan bahwa penerapan WFH ini sangat berat, 40 persen

menyatakan bahwa WFH tidak berbeda saat bekerja dikantor, dan 30 persen lainnya tidak menjawab survey tersebut. PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyimpulkan 30 persen ASN yang tidak menjawab survey tersebut ialah ASN yang tidak bekerja sama sekali saat WFH. Aparatur Sipil Negara yang tidak melakukan pekerjaannya saat WFH diduga karena tidak memahami penggunaan teknologi digital. Banyak ASN yang beralasan tidak mengerti teknologi digital karena usia mereka yang sudah lanjut, ada juga yang berkomentar bahwa tidak terbiasa dengan cara kerja digital tersebut.

Pemahaman akan literasi digital ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah secara serius. Pemerintah Sumatera Selatan turut mengupayakan perkembangan *e-government* dengan terus meningkatkan pemahaman masyarakat dan pegawai pemerintah akan literasi digital serta perkembangan teknologi. Tercatat indeks literasi digital Sumatera Selatan sudah mencapai predikat baik dengan nilai 3.46 berdasarkan 285 responden.

Gambar 2 Indeks Literasi Digital Sumatera Selatan



Sumber : [Indeks Literasi Digital Sumatera Selatan](#)

Kemampuan literasi digital pada pegawai pemerintah sangat berdampak pada perkembangan *e-government*, salah-satunya untuk badan pengawas pemerintah seperti Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan merupakan sebuah instansi yang melaksanakan unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi Sumatera Selatan yang bekedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur, mengontrol kehematan, efisiensi, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko serta ikut andil dalam pemberantasan maladministrasi pada pemerintah provinsi Sumatera Selatan.² Perubahan sistem menjadi berbasis elektronik membuat Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan perubahan sistemnya menjadi berbasis elektronik dengan mengadopsi *e-government*.

Sistem pengadopsian dapat dilakukan secara perlahan-lahan seiring dengan persiapan lainnya. proses adopsi *e-government* disini dapat dilihat dengan cara kerja dari pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan memanfaatkan *e-government*. Proses adopsi lain dapat dilihat dengan sistem kantor yang menggunakan identifikasi sidik jari pada absensi pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, penggunaan website sebagai buku tamu yang dapat diakses oleh pengunjung melalui *gadget* dapat mempermudah jadwal pertemuan dengan pengunjung dan juga tidak akan mengganggu pekerjaan secara tiba-tiba. Proses adopsi *e-government* tidak serta-merta hanya menyediakan aplikasi maupun website yang digunakan untuk menunjang pekerjaan pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi juga menyediakan infrastruktur lain seperti ketersediaan media elektronik yang merata pada setiap sub bagian di kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, internet

² Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

yang memadai diberbagai sudut ruangan, serta wawasan dan skill dari pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Perubahan sistem tersebut telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan memanfaatkan beberapa *e-government* seperti:

- a. *Whistle Blowing System (WBS)* merupakan aplikasi yang digunakan untuk melaporkan indikasi pelanggaran korupsi di Lembaga pemerintahan. WBS mendeteksi kecurangan dan merupakan program internal integritas pegawai. (Haryanti, 2016:4)
- b. E-Sumsel yaitu website yang melakukan pencatatan data keuangan, penganggaran, perjalanan dinas dan lain sebagainya.
- c. LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) Merupakan layanan yang menyediakan tempat penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. (Kementerian PANRB, 2022)
- d. SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) ialah sebuah aplikasi yang diprogram untuk mengelola keuangan daerah terutama dalam penyusunan APBD pemda, sebagai entitas pelaporan pada tingkat SKPKD, dan sebagai entitas akuntansi pada tingkat SKPD (Tim Aplikasi SIMDA, 2022).
- e. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Pegawai) adalah sistem yang menyajikan data pegawai instansi yang berisikan pendataan pegawai, formasi dan perencanaan pegawai, penilaian angka kredit, penggajian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepegawaian (BKD Pemprov DKI Jakarta, 2022)
- f. Dan lain sebagainya.

Aplikasi atau website yang dibuat sedemikian rupa diharapkan mampu untuk menjadikan tugas dan fungsi pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih efisien, mudah, terakuntabilitas, dan berkualitas. Demi mewujudkan harapan tersebut, diperlukan kemampuan dan kebiasaan dari para pegawai untuk mengelola pekerjaan mereka menggunakan *e-government* yang telah tersedia. Penggunaan komputersasi ini sudah sangat digadang-gadangkan pemerintah sehingga pekerjaan lebih tertata dengan rapih mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan. Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perencanaan dan pencatatan laporan keuangan dilakukan dengan cara manual dengan direview oleh kasubag keuangan sampai dengan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan sehingga nantinya jika laporan tersebut di *approve* baru akan di *input* pada aplikasi SIMDA dan website SIPD. Aplikasi SIMDA dan website SIPD dipergunakan untuk mempermudah proses pengimputan yang telah diaplikasikan dalam bentuk laporan keuangan (LK) sehingga perencanaan dan pelaporan dapat tersusun rapih. Meskipun masih terdapat yang dilakukan secara manual, proses adopsi *e-government* masih terus berjalan seiring waktu.

Penilaian kinerja pegawai pun dilakukan dengan manual yang didasarkan pada format Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang diterbitkan pada Permen PAN-RB No.8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Permen PAN-RB No.6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan hasil SKP tersebut akan ada sebuah *punishment* dan *reward* bagi ASN yang memenuhi atau tidak memenuhi standar penilaian. Pemberian *reward* untuk pegawai yang memenuhi tidak diketahui secara pasti dalam bentuk seperti apa,

sedangkan *Punishment* yang diberikan dapat berupa sanksi sedang, skors, dan lain sebagainya.

E-government memunculkan sikap individu untuk menerima maupun menolak teknologi baru, sehingga dibutuhkan sebuah pemahaman akan digitalisasi. Pemahaman tersebut dapat memunculkan suatu persepsi individu mengenai *e-government* yang dipengaruhi oleh berbagai variabel dan indikator. Merealisasikan sebuah perubahan sistem dari yang dilakukan secara manual menjadi menggunakan sistem (*e-government*) dibutuhkan sebuah pengelolaan yang baik dengan cara membuat unit atau kelompok yang bertanggungjawab atas pengelolaan suatu *e-government*. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan turut membuat unit kerja yang bertanggungjawab mengelola *e-government*. Akan tetapi, sering kali tanggungjawab pengelolaan *e-government* tersebut dilimpahkan kepada satu pegawai yang memahami cara kerja *e-government* atau memiliki kemampuan literasi digital sehingga sering dijumpai pegawai yang memegang lebih dari lima tanggungjawab pengelolaan *e-government*. Pelimpahan pengelolaan tersebut didasarkan pada beberapa alasan, berdasarkan penelitian (Ngantung et al., 2014:7) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara usia dengan tingkat kemahiran menggunakan teknologi, adapun rentang umur pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Tabel 2 Rentang Usia Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Rentang Usia	Jumlah
51-65 tahun	31
41-50 tahun	52
31-40 tahun	15
24-30 tahun	2

Sumber: diolah oleh peneliti

Dilihat dari rentang umur tersebut lebih dari 50% pegawai inspektorat berusia lebih dari 40 tahun. Berdasarkan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023, terdapat 100 orang pegawai terdiri dari 54 orang laki-laki dan 46 orang perempuan dengan latar belakang sebagai berikut:

Tabel 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Alokasi dan Jenjang Pendidikan

No.	Alokasi	Jenjang Pendidikan						
		SD	SMP	SLTA	D3	S1	S2	S3
1.	Struktural	-	-	-	-	1	9	-
2.	Tenaga Administratif	-	-	4	1	7	3	2
3.	Tenaga Teknis	-	-	-	-	36	37	-
Jumlah		100 orang						

Sumber: (ITDAPROV SUMSEL, 2019:12)

Kemahiran suatu individu dalam menggunakan teknologi digital sangat mempengaruhi kualitas kinerjanya. (Rumata & Nugraha, 2020) dalam penelitiannya “Rendahnya tingkat perilaku digital ASN kementerian kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah” menyatakan bahwa setidaknya kemampuan dan pengetahuan teknologi digital ada pada diri ASN karena hal tersebut akan mendukung

tugas dan fungsi mereka dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, (Rumata & Nugraha, 2020) juga menyatakan bahwa literasi digital merupakan inti dari *digital government*. Hal tersebut juga dinyatakan pada penelitian (Ngantung et al., 2014) tentang Analisa Literasi TIK Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Manado dan Sumedang Regency ASN Digital Literacy (ASN Digital Literacy Improvement Strategy Sumedang Regency) yang dilakukan oleh (Wulandari et al., 2022).

Perkembangan sistem elektronik pada pemerintah ini bukan hanya semata-mata mengikuti gaya zaman, akan tetapi sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, akan tetapi pada penelitian (Nugraha, 2018) Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman) menyatakan pengembangan *e-government* saat ini hanya sebatas penyedia informasi dan tidak ada komunikasi dua arah antar masyarakat dan pemerintah karena kurangnya fasilitas dan pemahaman mengenai teknologi *e-government*. Selain itu, pada penelitian (Wirawan, 2020) tentang Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia menyatakan implementasi *e-government* di Indonesia dihambat oleh kurangnya budaya berbagi informasi dan budaya dokumentasi, minimnya kemampuan dibidang IT pada SDM, infrastruktur yang kurang dan terbatasnya akses informasi. Berdasarkan uraian tersebut menggambarkan bahwa literasi digital sangat mempengaruhi ASN dalam melakukan pekerjaan sehari-hari mereka, dan peningkatan *e-government* perlu dilakukan secara serius oleh pemerintah yang menginginkan pemerintahan berbasis elektronik.

Peneliti mencoba mengulik mengenai literasi digital terhadap pengadopsian *e-government* pada pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai

lembaga pengawasan pemerintahan daerah Sumatera Selatan dengan menggunakan *Theory Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. TAM merupakan model penerimaan individu terhadap sistem atau teknologi baru. Berdasarkan model TAM, penerimaan teknologi didasarkan pada dua variabel yaitu Persepsi pengguna terhadap kegunaan (*perceived usefulness*) dan Persepsi pengguna terhadap kemudahan (*perceived ease of use*) yang mana individu akan menerima jika sistem tersebut mudah dan bermanfaat. Peneliti berusaha menggali apakah intensi mengadopsi *e-government* didasarkan atas kedua variabel TAM. Penelitian yang menggunakan model TAM sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti (Akbar & Mar'aini, 2020; Heryanta & Ayuni, 2019; Martunisa et al., 2021; Sensuse & Widiatmika, 2012) melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dengan fokus penerimaan dan penggunaan teknologi yang dipengaruhi oleh Persepsi pengguna terhadap kegunaan (*perceived usefulness*) dan Persepsi pengguna terhadap kemudahan (*perceived ease of use*). Penelitian tersebut menganalisis dengan menggunakan berbagai aspek seperti gender, usia, latar belakang Pendidikan, tugas pokok dan fungsi, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh (Khatimi et al., 2022) dengan penelitiannya Analisis Faktor Penerimaan Dan Penggunaan Aplikasi Palui Baiman Menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) menyatakan bahwa *perceived usefulness* tidak mempengaruhi penerimaan pengguna aplikasi palui baiman dan *perceived ease of use* mempengaruhi penerimaan pengguna aplikasi palui baiman.

Banyak sekali penelitian dengan menggunakan *Technology Acceptance Model*, Akan tetapi masih sedikit penelitian yang menjadikan literasi digital sebagai variabel untuk mengadopsi *e-government*. Sehingga peneliti sangat tertarik melakukan

penelitian dengan judul “**Literasi Digital dan Intensi Untuk Mengadopsi E-Government (Survei Pada Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah di bahas pada latar belakang, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah literasi digital memiliki pengaruh atas pengadopsian *E-Government* di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah literasi digital memiliki pengaruh terhadap persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) *E-Government* di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) memengaruhi pengadopsian *E-Government* di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah literasi digital memengaruhi intensi penggunaan *E-Government* melalui persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) mempengaruhi pengadopsian *E-Government* di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
6. Apakah literasi digital mempengaruhi persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) *E-Government* di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
7. Apakah literasi digital mempengaruhi pengadopsian *E-Government* melalui persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan atas permasalahan yang telah dirumuskan sehingga penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaruh literasi digital dengan intensi mengadopsi *E-Government* di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Menjelaskan pengaruh literasi digital dengan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) *E-Government* di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Menjelaskan pengaruh persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dengan intensi mengadopsi *E-Government* di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Menjelaskan pengaruh literasi digital dengan adopsi *E-Government* melalui persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Menjelaskan pengaruh literasi digital dengan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Menjelaskan pengaruh persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dengan adopsi *E-Government* di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Menjelaskan pengaruh literasi digital dengan adopsi *E-Government* melalui persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis bagi masyarakat dan pemerintah.

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kemajuan jurusan ilmu administrasi publik dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan literasi digital dan adopsi *e-government* dengan konteks yang berbeda.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan literasi digital dan pengadopsian teknologi informasi di Indonesia khususnya untuk pemerintahan dan juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pengembangan teknologi informasi di pemerintahan Indonesia.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran pada masyarakat bahwa pemahaman mengenai teknologi informasi khususnya dalam layanan publik sangat penting di zaman yang serba menggunakan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Jogiyanto. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Struktur Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Penerbit ANDI.
- Abdullah, Ma'ruf. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Pressindo.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akbar, Y. R., & mar'aini. (2020). Implementation Of Regional Financial Management Information System Using the Technology Acceptance Model (TAM) Approach to Quality Of Riau Provincial Financial Statements. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 92–101.
- Ameliah, R., Negara, R. A., & Rahmawati, I. (2021). *Status Literasi Digital di Indonesia 2021*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aswin, A., & Mediyastuti Sofyan, M. (2022). Dinamika Pelaksanaan Electronic Governance Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(Vol. 13 No. 1). <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.5152>
- Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: A review of concepts. *Journal of Documentation*, 2, 218–259.
- Bawden, D. (2008). Origins and Concepts Of Digital Literacy in Digital Literacy. *Shear&Knobel.Indd*.
- Benbasat, I., Barki, H., HEC Montréal, & University of British Columbia, Canada. (2007). Quo Vadis TAM? *Journal of the Association for Information Systems*, 8(4), 211–218. <https://doi.org/10.17705/1jais.00126>
- BKD Pemprov DKI Jakarta. (2022). Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). *Pegawai Jakarta*. <https://pegawai.jakarta.go.id/>
- Cresswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. pustaka pelajar.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Davis, F. D. (1993). User Acceptance of Information Technology: System Characteristics, User Perceptions and Behavioral Impacts. *International Journal of Man-Machine Studies*, 38(3), 475–487. <https://doi.org/10.1006/imms.1993.1022>
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A. A. G. S., Zonyfar, C., Nuraini, R., Purnia, D. S., Setyawati, I., Evi, T., Permana, S. D. H., & Sumartiningsih, M. S. (2022). *Metodologi Penelitian*. CV. Pena Persada.

- Haryanti, A. (2016). *Penerapan Whistle Blowing System (WBS-BKN) dalam Mendukung Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, dan Prosedur Manajemen Kepegawaian ASN*. Badan Kepegawaian Negara.
- Heryanta, J., & Ayuni, R. F. (2019). Pengaruh Behavioral Intention Terhadap Actual Use Pengguna GO-JEK Indonesia dengan Pendekatan Technology Acceptance Model dan Innovation Diffusion Theory. *jurnal ilmiah mahasiswa FEB*, 7(2).
- ITDAPROV SUMSEL. (2019). *Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023*. PEMKOT SUMSEL.
- ITDAPROV SUMSEL. (2022). *Visi Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. <https://inspektorat.sumselprov.go.id/konten/8#:~:text=Adapun%20Visi%20Inspektorat%20%3A%20Menjadi%20lembaga%20pengawas%20internal,Meningkatkan%20Kapabilitas%20pengawasan%20melalui%20aparatur%20pengawasan%20yang%20profesional>
- Kementerian PANRB. (2022). *Apa Itu LAPOR!? LAPOR!* <https://www.lapor.go.id/tentang>
- Khatimi, H., Alkaff, M., & A.G.D., M. R. (2022). Analisis Faktor Penerimaan Dan Penggunaan Aplikasi Palui Baiman Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 11(2), 223–234. <https://doi.org/10.32736/sisfokom.v11i2.1275>
- Lankshear, C., & Knobel, M. (n.d.). Digital Literacy and Digital Literacies: *NORDIC JOURNAL OF DIGITAL LITERACY*, 13.
- Law, N., Woo, D., Torre, J. de la, & Wong, G. (2018). A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. *UNESCO Institute for Statistics (UIS/2018/ICT/IP/51)*.
- Martunisa, C. B., Hutapea, R. S., & Dahtiah, N. (2021). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dengan Pendekatan Technology Acceptance Model Terhadap Penggunaan E-Filing Di KPP Pratama Cimahi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cimahi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 280–289.
- Mulyani, A., & Kurniadi, D. (2015). Analisis Penerimaan Teknologi Student Information Terminal (S-IT) dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus: AMIK Garut). *Jurnal Wawasan Ilmiah Manajemen dan Teknik Informatika*, 7(12), 23–35.
- Ngantung, D. R. A., Lumenta, A. S. M., & Karouw, S. D. S. (2014). Analisa Literasi TIK Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Teknik Informatika*, 13(4), 8.
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.
- Rumata, V. M., & Nugraha, D. A. (2020). Rendahnya Tingkat Perilaku Digital ASN Kementerian Kominfo: Survei Literasi Digital pada Instansi Pemerintah.

- Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 4(2), 467. <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i2.2230>
- Santosa, P. I. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif: Pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS*. Penerbit ANDI.
- Saputri, D. S., & Febryan A. (2022). Ternyata, 30 Persen ASN Nggak Ngapa-ngapain Saat WFH. *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/rff9yj328/ternyata-30-persen-asn-nggak-ngapangapain-saat-wfh>
- Sensuse, D. I., & Widiatmika, I. M. A. A. (2012). Pengembangan Model Penerimaan Teknologi Internet oleh Pelajar dengan Menggunakan Konsep Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Sistem Informasi*, 4(2), 81. <https://doi.org/10.21609/jsi.v4i2.249>
- Setyawati, rena eka. (2020). Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use Terhadap Behavioral Intention To Use dengan Attitude Towards Using sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Gopay Dikota Yogyakarta). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 3(1), 39–51. https://doi.org/10.26460/ed_en.v3i1.1470
- Silcock, R. (2001). What is E-government. *Parliamentary Affairs*, 54(1), 88–101. <https://doi.org/10.1093/pa/54.1.88>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tim Aplikasi SIMDA. (2022). Sejarah SIMDA. *BKBP*. <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/334/Sejarah-SIMDA.bpkp>
- Utomo, D., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis WEB. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(1), 9–21.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>
- Wulandari, I., Priatna, R., & Andikaputra, F. A. T. (2022). Sumedang Regency ASN Digital Literacy. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Adiministrasi Bisnis*, 6(2), 11.